

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.174.

Andi Pangeran Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Andreas O'Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, Kluwer Law International, New York, 2002

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Univeritas Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, ind-hill Co, Jakarta, 1992

_____, *DPD, DPR dan MPR dalam UUD 1945*, FHUII Press, Yogyakarta, 2003.

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001

Bagir Manan & Kuantan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

Budiman, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005

C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Bandung, 2006

Charles Simabura, *Parlemen Indonesia, Lintas Sejarah dan Sistemnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

C.S.T Cansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral*, UI Press, Jakarta, 2010

Hamzah Halim & Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

- Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai landasan Membangun Inndonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001.
- Hariyono dkk., *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerinthaan & Al Quran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- King Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Koesoemahatmadja. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001
- Mahmutarom H.R., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010.
- Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984).
- Mariam Budiarto, *Dasar - dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca - Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009
- Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, Setara Press, Malang, Jatim., 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009

- , *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- , *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FHUII Press, Yogyakarta, 2007
- , *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FHUII Press, Yogyakarta, 2003
- , *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- , *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- , Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prayudi Atmosudjiro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Riawan Tjandra & Kresno Budi, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Atmajaya Press, Yogyakarta, 2009
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- , *Hukum Administrasi Negara, dikutip dari Ni'matul Huda, Negara hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sirajuddin Dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang, 2016
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sri Soematri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014
- , *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987

_____, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2008.

Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

_____, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Toni Andrianus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Pasal 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Dasar Pasal 14 tahun 1945 tentang Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 10 hingga pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tugas dan kewenangan Presiden.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954.

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disahkan pada 19 Oktober 1999

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/PidSus/2017/PN Mtr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PidSus/2018 tahun 2018.

Data Elektronik

kemendagri.go.id<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah> diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 21.49

hukumonline.com<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden> diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 22.49

<https://news.detik.com/kolom/d-3914099/menimbang-grasi-abu-bakar-baasyir>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 10.15.

<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses tanggal 26-09-2019, jam 20:48.

https://www.academia.edu/12148178/SEJARAH_UNSUR_NEGARA_HUKUM_DAN_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, diakses tanggal 26-09-2019, jam 21:05.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/negara-hukum/>, diakses tanggal 26-09-2019, jam 21:38.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diambil tgl. 03/10/19, jam 20:15.

<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Amnesti-Tapol-Papua.pdf>, diambil pada tgl 16/10/2019, pada jam 17:16.

<https://almi.or.id/2019/07/19/analisis-di-balik-kontroversi-pemberian-amnesti-jokowi-kepada-baiq-nuril-indonesia-butuh-uu-amnesti-yang-baru/>, diambil pada tanggal 14-10-2019, jam 14:20.

<https://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>, diambil pada tanggal 31/10/2019, jam 23:23.

<http://www.pn-stabat.go.id/publik/pengetahuan-publik/hak-pencari-keadilan.html>, diakses pada tgl. 7-11-2019, jam 15:58.

<https://news.detik.com/berita/d-3891806/mengenal-perbedaan-grasi-amnesti-dan-abolisi>, diakses pada tanggal 9/11/2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/149562-ID-kekuasaan-presiden-dalam-pemberian-grasi.pdf>, diambil pada tanggal 30/10/2019, pada jam 15:25.